

# PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU



## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MALINAU  
TAHUN 2018

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Malinau ini dapat tersusun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman ini disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau selama Tahun Anggaran 2018. **Laporan ini Memuat Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.**

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih perlu penyempurnaan, karena itu kami mengharapkan masukan dan saran demi penyempurnaan laporan di masa yang akan datang.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi, baik untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman maupun Pemerintah Kabupaten Malinau guna perbaikan program dan kegiatan kedepan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman ini.

Malinau, 23 Januari 2019  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum,  
Penataan Ruang, Perumahan Dan  
Kawasan Permukiman  
Kabupaten Malinau



TOMY, SE, M.Si  
NIP. 19710110 199803 1 009

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2018 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahunan 2018 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2018. Penyusunan LKjIP ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun anggaran 2018.

Dalam upaya merealisasikan good governance, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau 2016-2021. Visi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau yaitu :

***“TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG TERPADU MELALUI PEMANFAATAN RUANG YANG AMAN, NYAMAN, PRODUKTIF DAN BERKELANJUTAN”.***

Sesuai dengan Visi tersebut, maka Misi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau adalah :

1. Meningkatkan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta tata kelola organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Menyediakan Perencanaan Pembangunan dibidang Cipta Karya, Bina Marga, Pengairan, Penataan Ruang, Pertamanan dan Pemakaman Serta Pertanahan.
3. Menyelenggarakan Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Prasarana Infrastruktur Dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman.

4. Menyelenggarakan Pembangunan dan Meningkatkan Kualitas jaringan jalan dan jembatan.
5. Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur jalan tani, sumberdaya air dan irigasi guna mendukung program Ketahanan Pangan dan Rasda, dengan pendayagunaan sumber daya air, konservasi sumberdaya air serta pengendalian daya rusak air.
6. Meningkatkan peran penataan ruang sebagai acuan matra spasial pembangunan daerah.
7. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi spasial daerah dalam rangka percepatan perwujudan kebijakan satu peta
8. Meningkatkan pelayanan dibidang pertamanan, pemakaman dan ketenagalistrikan.
9. Menyediakan Ruang Terbuka Publik yang proporsional sehingga terwujud ruang aktivitas publik yang nyaman dan berkelanjutan
10. Melaksanakan pengadaan dan pengelolaan pertanahan yang tertib, teratur dan berkeadilan

Dalam rangka pelaksana tugas pemerintah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai, sehingga dapat meningkatkan kapasitas organisasi dan mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran serta strategi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau, sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan tata laksana pemerintah yang baik dan benar serta meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Tujuan :

Untuk meningkatkan ketatalaksanaan, kelembagaan. Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah :

- Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia;
- Meningkatkan Manajemen Kelembagaan;

- Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kerja.
- 2. Memenuhi kebutuhan Prasarana Jalan dan Jembatan yang nyaman untuk memperlancar transportasi guna meningkatkan Perekonomian Masyarakat.

Tujuan :

Untuk membangun, memelihara dan meningkatkan Prasarana Jalan dan Jembatan

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah :

- Meningkatkan Panjang Jalan dalam Kondisi Baik;
- Meningkatkan Aksesibilitas terhadap Wilayah-wilayah Tertinggal atau Terisolir;
- Meningkatkan Daya Dukung Prasarana Jalan dan Jembatan.

- 3. Memenuhi kebutuhan Sumber Daya Air dan Irigasi Masyarakat Kabupaten Malinau.

Tujuan :

Untuk meningkatkan Pelayanan dan Ketersediaan Sumber Daya Air Baku.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah :

- Meningkatkan Jumlah Masyarakat yang memperoleh Layanan Air Baku;
- Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Air;
- Meningkatkan daya dukung Prasarana Sumber Daya Air;
- Melindungi Kawasan Permukiman dan Produksi terhadap bahaya Banjir.

- 4. Memenuhi Prasarana dan Sarana Dasar Gedung Pada Kawasan Perkotaan berlandaskan asas manfaat, keselamatan, keseimbangan serta keserasian bangunan dan lingkungan.

Tujuan :

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana jalan lingkungan serta gedung pemerintah. Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah :

- Meningkatkan pelayanan Perumahan dan Pemukiman bagi Masyarakat;
- Meningkatkan daya dukung Prasarana keciptakaryaan.

- 5. Memenuhi terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan

Tujuan :

- Terselenggaranya penataan ruang kawasan strategis berbasis daya dukung lingkungan dan potensi lokal.

- Terselenggaranya tertib penataan ruang melalui penguatan perangkat dan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penataan ruang
  - Terselenggaranya penataan ruang dan pengelolaan kabupaten yang memenuhi standar dan terintegrasi.
6. Memenuhi peningkatan kuantitas dan kualitas taman kota dan Ruang Terbuka Hijau yang bersih, asri, dan nyaman serta meningkatkan kuantitas dan kualitas taman pemakaman umum.
- Meningkatkan lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah
  - Terciptanya kualitas dan kuantitas RTH sebagai RTH
  - Meningkatkan kinerja bidang pemakaman sebagai pendukung RTH aktif dan layanan masyarakat terhadap kebutuhan lahan makam.
  - Meningkatkan penerangan kota yang hemat energi dan berwawasan lingkungan
7. Mengembangkan infrastruktur pertanahan dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan pertanahan
- Peningkatan infrastruktur peta pertanahan dalam rangka legalisasi aset dan kepastian hukum hak atas tanah serta mengurangi potensi sengketa tanah.
  - Pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
  - Peningkatan kinerja layanan pertanahan.
  - Penegakan hukum terkait pertanahan serta mengurangi jumlah tanah-tanah terlantar.

Pencapaian kinerja input atau penyerapan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau pada tahun 2018 **adalah 99,48% atau sebesar Rp. 165.070.504.041,00 (seratus enam puluh lima miliar tujuh puluh juta lima ratus empat ribu empat puluh satu rupiah) dari Total Pagu Anggaran sebesar Rp. 168.421.310.464,75 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah tujuh puluh lima sen)** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Persentase berdasarkan Pagu Anggaran

NO.	BIDANG	ANGGARAN ( Rp. )	REALISASI ( Rp. )	%
1	SEKRETARIAT	3.503.710.000,00	3.422.462.148,00	97,68
2	BINA MARGA	78.549.301.416,75	78.314.258.098,00	99,70
3	CIPTA KARYA	42.704.548.349,00	42.224.663.697,00	98,88
4	PENGAIRAN	20.562.923.000,00	18.832.439.054,00	91,58
5	TATA RUANG	2.300.002.500,00	2.256.231.357,00	98,10
6	PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	8.626.045.199,00	8.603.000.404,00	99,73
7	PERTANAHAN	1.680.000.000,00	1.428.340.389,00	85,02
8	UPTD	10.494.780.000,00	9.989.108.894,00	95,18
	<b>TOTAL</b>	168.421.310.464,75	165.070.504.041,00	99,48

**Belum Optimalnya Capaian Kinerja / Penyerapan Anggaran disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut :**

1. **Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau pada tahun 2018 baru sebanyak 86 orang.**
2. **Adanya Defisit anggaran di tahun sebelumnya yang berdampak pada tidak dapat terprogramnya keuangan beberapa kegiatan akibat penundaan pembayaran Ke Tahun 2018.**

Capaian Kinerja Sasaran (Outcome) rata-rata 100%.

Berdasarkan uraian diatas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan dan Pembangunan Kapasitas Sumber Daya Manusia dilakukan lebih intensif melalui Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan.
2. Melakukan Finalisasi nilai anggaran sebelum melakukan penginputan nilai DPA.

Melalui LKjIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau 2016-2021.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Tuntutan reformasi yang telah bergulir menghendaki terselenggaranya Pemerintahan yang bertanggung jawab dan bebas dari pengaruh Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Masyarakat sebagai salah satu stakeholder akan semakin kritis, cerdas dan sadar akan hak-hak sebagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap kelangsungan organisasi. Menghadapi hal tersebut, maka organisasi publik harus mengubah paradigma pertanggungjawaban atas wewenang yang diembannya. Perubahan tersebut menghendaki agar sumber daya yang dikelola oleh organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas dan akuntabel.

Seiring dengan itu, perkembangan managemen modern telah membuktikan bahwa keterwujudan Pemerintahan yang bersih (Good Governance) dalam sebuah organisasi akan menjadi hal yang sangat penting bagi penyelenggara dimata publik. Sebagai salah satu pilar Pemerintahan yang bersih, pertanggungjawaban (accountability) menjadi syarat mutlak munculnya kepercayaan public terhadap penyelenggara aktifitas organisasi.

Tuntutan reformasi tersebut diatas telah diakomodasikan dalam ketetapan MPR RI Nomor XI / MPR/ 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Yang diperkuat dengan TAP MPR VIII/2001 tentang arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Untuk mendorong pelaksanaan ketentuan tersebut Pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan penyelenggara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap akhir Tahun Anggaran.

Dilandas kesadaran yang sangat mendalam akan pentingnya akuntabilitas public baik bagi management maupun bagi stakeholders, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2018 yang merupakan pertanggungjawaban tahunan atas Rencana Strategis Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan.

## **1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **1.1.1 Tugas Pokok**

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **1.1.2.Fungsi**

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang cipta karya, bina marga, Sumber Daya Air, penataan ruang, Pertamanan dan Pemakaman serta Pertanahan.
2. Penyusunan Perencanaan bidang Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya air, Penataan ruang, Pertamanan dan Pemakaman serta Pertanahan.
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum bidang Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air, Penataan Ruang, Pertamanan dan Pemakaman serta Pertanahan.
4. Pembinaan, Koordinasi, Pengendalian dan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Cipta karya, Bina Marga, Sumber Daya Air, Penataan Ruang, Pertamanan dan Pemakaman serta Pertanahan.
5. Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
6. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

7. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang Tugas dan Fungsinya

## **1.2 STRUKTUR ORGANISASI**

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, sesuai dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 diuraikan Susunan Organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris dengan Sub :
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian,
  - b. Subbagian Penyusunan Program,
  - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Cipta Karya terdiri dari Seksi:
  - a. Seksi Penataan Bangunan,
  - b. Seksi Penyehatan Lingkungan,
  - c. Seksi Perumahan dan Permukiman.
4. Bidang Bina Marga terdiri dari Seksi :
  - a. Seksi Perencanaan Bangunan Jalan dan Jembatan,
  - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan,
  - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
5. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari Seksi:
  - a. Seksi Perencanaan Pengembangan SDA dan Irigasi,
  - b. Seksi Irigasi dan Rawa,
  - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Air.
6. Bidang Tata Ruang:
  - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang,
  - b. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang,
  - c. Seksi Pengelolaan Data Geospasial dan Perpetaan.
7. Bidang Pertamanan dan Pemakaman:
  - a. Seksi Pertamanan,

- b. Seksi Pemakaman,
- c. Seksi Penerangan Jalan dan Energi Baru Terbarukan.

8. Bidang Pertanahan:

- a. Seksi Pengadaan Tanah,
- b. Seksi Pengukuran Tanah,
- c. Seksi Penyelesaian Masalah Tanah.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2018 dapat dilihat pada halaman berikut ini :

### 1.3 Sumber Daya Aparatur

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau per 31 Desember 2018, memiliki Sumber Daya Aparatur sebanyak 108 (seratus delapan) orang, yang terdiri dari 86 (delapan puluh enam) orang PNS, 1 (satu) orang PTT (Pegawai Tidak Tetap), dan 21 (dua puluh satu) Honorer.

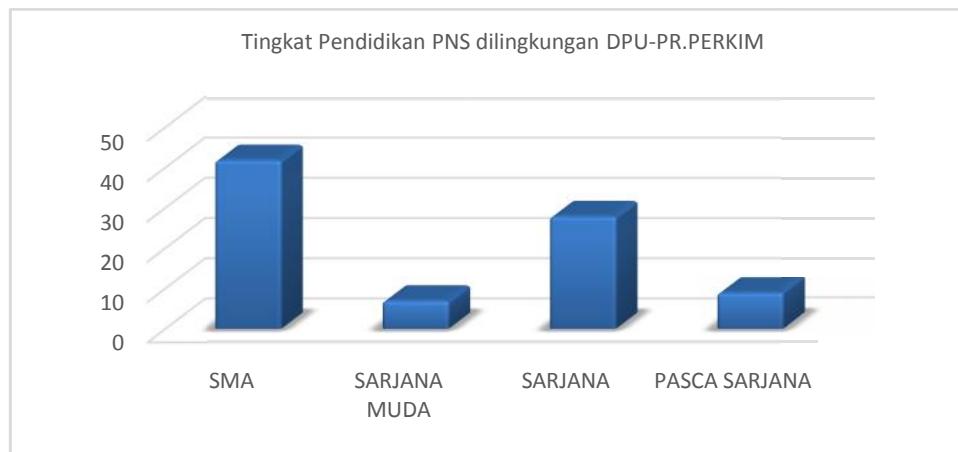
Berdasarkan analisis beban kerja di bandingkan banyaknya SDM yang ada, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan karena adanya struktur yang masih lowong, disamping itu dari segi keahlian teknis perencanaan pegawai yang ada masih belum memadai.

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	6
4	Kepala UPTD	1
5	Kepala Sub Bidang	3
6	Kepala Sub Bagian UPTD	1
7	Kepala Seksi	18
8	Staf	55
9	Honorer	21
10	PTT	1
	<b>TOTAL</b>	<b>108</b>

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau berdasarkan pendidikan dan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan

No	Nama OPD	Kualifikasi Pendidikan				Jumlah
		SLTA	Sarjana Muda	Sarjana	Pasca Sarjana	
1	DPU-PR.PERKIM	42	7	28	9	86



Grafik 1.3.1

Tabel 1.3.2 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

No	Nama OPD	Kualifikasi Golongan				Jumlah
		Golongan I	Golongan II	Golongan III	Golongan IV	
1	DPU-PR.PERKIM	0	42	38	6	86

#### 1.4 LINGKUNGAN STRATEGIS

##### Lingkungan Internal

###### a. Kekuatan

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia.
2. Sarana dan Prasarana (Peralatan dan Inventaris Kantor).
3. Pembiayaan (Anggaran).
4. Komitmen Pimpinan Organisasi.
5. Konsep Perencanaan teknis yang baik.

**b. Kelemahan**

1. Masih kurangnya SDM yang mengcover pekerjaan-pekerjaan teknis. Jumlah kegiatan yang ada tidak sebanding dengan tenaga Teknis.
2. Belum memadainya Sarana dan Prasarana untuk menunjang pekerjaan – pekerjaan teknis.
3. Anggaran yang tersedia belum cukup membiayai program/kegiatan yang ada.

**Lingkungan Eksternal**

**a. Peluang**

1. Konsultan dan Kontraktor.
2. Dinas, Badan, Departemen dan Lembaga terkait lainnya.
3. Komitmen Lembaga Legislatif (DPRD).
4. Komitmen Pimpinan Daerah.
5. Kondisi alam / lingkungan.

**b. Ancaman**

1. Belum maksimalnya sumber daya yang dimiliki konsultan dan kontraktor baik peralatan maupun tenaga ahli.
2. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam setiap pelaksanaan pekerjaan.
3. Tidak tercapainya hasil pengawasan anggaran dan proyek yang maksimal.
4. Bencana Alam (Longsor, Banjir, dan lain-lain).

**Alur Pikir Penyajian**

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan mengkomunikasikan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau selama Tahun Anggaran 2018, yang mana Capaian Kinerja (*Performance Result*) Tahun 2018 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kerja (*Performance Plan*) Tahun 2019, sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Organisasi.

Analisis atas Capaian Kinerja terhadap Rencana Kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah Rencana Kerja (Performance Gap) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN STRATEGIK**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIK**

Sebagai sebuah organisasi sektor publik, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan kebijakan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

##### **2.1.1. VISI DAN MISI**

###### **Visi**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau dijabarkan sebagai berikut :

**“Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Terpadu melalui Pemanfaatan Ruang yang Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan”.**

Visi yang dirumuskan ini juga menjadi acuan dan penuntun bagi setiap upaya yang akan dikembangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau ke depan.

###### **Misi**

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau sebagaimana telah

digariskan diatas, maka dipandang perlu untuk menggariskan beberapa Misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta tata kelola organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Menyediakan Perencanaan Pembangunan dibidang Cipta Karya, Bina Marga, Pengairan, Penataan Ruang, Pertamanan dan Pemakaman Serta Pertanahan.
3. Menyelenggarakan Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Prasarana Infrastruktur Dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Menyelenggarakan Pembangunan dan Meningkatkan Kualitas jaringan jalan dan jembatan.
5. Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur jalan tani, sumberdaya air dan irigasi guna mendukung program Ketahanan Pangan dan Rasda, dengan pendayagunaan sumber daya air, konservasi sumberdaya air serta pengendalian daya rusak air.
6. Meningkatkan peran penataan ruang sebagai acuan matra spasial pembangunan daerah.
7. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi spasial daerah dalam rangka percepatan perwujudan kebijakan satu peta
8. Meningkatkan pelayanan dibidang pertamanan, pemakaman dan ketenagalistrikan.
9. Menyediakan Ruang Terbuka Publik yang proporsional sehingga terwujud ruang aktivitas publik yang nyaman dan berkelanjutan
10. Melaksanakan pengadaan dan pengelolaan pertanahan yang tertib, teratur dan berkeadilan

## 2.1.2. TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi.

Tujuan yang dimaksudkan didalam LKJiP ini adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun. Secara kolektif, tujuan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tujuan, sasaran dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1.2 : Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>I. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kesatu</b>			
1. Meningkatnya kualitas SDM	1.a. Terciptanya SDM yang handal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengadakan rapat staf setiap awal bulan (tgl 1 s/d 5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan staf pada bidang secara proporsional dan sesuai keahlian.</li> </ul>
2. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana kerja.	2.a. Meningkatnya kelancaran kerja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mapping dan Pelatihan aparatur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan ATK dan asset satu pintu</li> </ul>
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan dan asset yang cepat, tepat, terukur, dan akuntabel	3.a. Terwujudnya akuntabilitas organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kapasitas ASN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan dan pelatihan secara berjenjang.</li> </ul>

4. Meningkatnya sistem monitoring pegawai	4.a. Meningkatnya kedisiplinan aparatur  4.b. Meningkatnya kinerja aparatur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan absensi manual dan finger print.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian Reward dan Sanksi.</li> </ul>
---	--	--	--

## II. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kedua

1. Menyediakan Dokumen Perencanaan dibidang Cipta Karya, Bina Marga, Pengairan, Penataan Ruang, Pertamanan dan Pemakaman Serta Pertanahan	1.a. Tersedianya Dokumen Perencanaan Sebagai Acuan Pelaksanaan kegiatan pembangunan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan konsultasi publik perencanaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan SDM aparatur yang mengelola dokumen perencanaan.</li> <li>• Penetapan prioritas kegiatan berdasarkan dokumen perencanaan yang tersedia.</li> </ul>
	1.b. Terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan perencanaan dilaksanakan dengan alokasi waktu yang cukup.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan strategis harus didahului studi kelayakan.</li> </ul>

## III. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Misi Ketiga

1. Tercapainya infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi, Jalan lingkungan) yang layak	1.a. Tersedianya infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi, Jalan lingkungan) yang layak pada Perumahan dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan air minum, sanitasi, Jalan lingkungan dengan meningkatkan partisipasi RT dan dunia usaha.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan infrastruktur dasar di kawasan kumuh kabupaten.</li> </ul>
--	---	--	---

pada Perumahan dan Kawasan Permukiman.	Kawasan Permukiman.		
2. Tercapainya program RT BERSIH.	2.a. Meningkatnya Kualitas Lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan skala prioritas penanganan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan partisipasi masyarakat.</li> </ul>
3. Tercapainya target 100 - 0 - 100 (100 % air minum, 0 % pemukiman kumuh, 100 % Sanitasi).	3.a. Tersedianya fasilitas air minum, sanitasi di kawasan pemukiman.  3.b. Terbangunnya perumahan layak huni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan skala prioritas penanganan.</li> <li>Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan fasilitas air minum, sanitasi di kawasan pemukiman.</li> <li>Penyusunan Studi Kelayakan KSCT .</li> </ul>

#### IV. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Misi Keempat

1. Terbangunnya infrastruktur prasarana jalan dan jembatan yang menghubungkan antar wilayah dan kawasan.	1.a. Tersedianya jaringan jalan dan jembatan yang memadai untuk meningkatkan kegiatan ekonomi antar wilayah dan kawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan skala prioritas penanganan jalan dan jembatan.</li> </ul>
--	---	---	---

2. Tercapainya pemanfatan jalan dan jembatan Secara optimal.	2.a. Terlaksananya pemeliharaan Jalan dan Jembatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan inventarisasi kondisi jalan dan jembatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan.</li> </ul>
	2.b. Meningkatnya panjang jalan dalam kondisi baik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mensinergikan pembangunan jalan kabupaten dengan jalan provinsi dan nasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan peningkatan kapasitas dan kualitas jalan.</li> <li>• Melaksanakan pembangunan jembatan.</li> </ul>

#### V. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kelima

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan tani.	1.a. Terpeliharanya infrastruktur jalan tani.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan dukungan kedaulatan pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan Daerah Irigasi (DI) kabupaten</li> </ul>
2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya air dan irigasi guna mendukung program Ketahanan Pangan dan Rasda.	2.a. Terbangunnya Dan Terpeliharanya sumberdaya air dan irigasi guna mendukung program RASDA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas ketahanan air.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penertiban dan pengamanan sempadan sungai.</li> </ul>
3 Meningkatkan Kualitas Air baku (Air minum), Air baku pertanian	3.a. Tersedianya Kualitas Air baku (Air minum), Air baku pertanian dan keperluan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menfasilitasi pemerintah provinsi dalam menyediakan prasarana air baku.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan pembangunan fasilitas air baku.</li> </ul>

dan keperluan lainnya.	lainnya.		
4 Melaksanakan pembangunan Kontruksi Penahan Longsor sungai dan saluran drainase akibat daya rusak air.	4.a. Terbangunnya Kontruksi Penahan Longsor sungai dan saluran drainase akibat daya rusak air.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan lingkungan permukiman dari daya rusak air.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlibatan masyarakat dan swasta dalam pengamanan sempadan sungai.</li> </ul>
<b>VI. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Misi Keenam</b>			
1. Meningkatnya keterpaduan dan keselarasan pembangunan daerah	1.a. Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah kecamatan dan desa 1.b. Meningkatnya perwujudan program prioritas pembangunan daerah 1.c. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun dokumen perencanaan penataan ruang yang sesuai daya tampung dan daya dukung wilayah.</li> <li>Menetapkan payung hukum penyelenggaraan penataan ruang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peninjauan kembali dan revisi perda RTRW</li> <li>Penetapan perda rencana rinci kawasan</li> </ul>
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan penataan	2.a. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan swasta tentang perencanaan penataan ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan penyebarluasan informasi penataan ruang.</li> <li>Menyediakan kota saran dan pengaduan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelimpahan wewenang kepada kecamatan dan desa.</li> <li>Pengintegrasian penyelenggaraan penataan ruang</li> </ul>

ruang	2.b. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan swasta tentang pemanfaatan ruang		dengan program prioritas daerah
	2.c. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan swasta tentang pengendalian pemanfaatan ruang.		
3. Meningkatkan ketaatan pemanfaatan ruang	3.a. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan turbinlakwas (pengaturan pembinaan pelaksanaan pengawasan) penataan ruang.</li> <li>• Menerapkan pola insentif dan disinsentif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) penataan ruang.</li> <li>• Pembentukan TIM penertiban penataan ruang.</li> <li>• Pemberian kemudahan pelayanan penataan ruang.</li> </ul>

#### VII. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Misi Ketujuh

1 Meningkatkan ketersediaan data dan informasi spasial untuk mendukung perencanaan pembangunan	1.a. Tersedianya data dan informasi yang lengkap. 1.b. Terlaksananya pemutakhiran data dan informasi secara periodic. 1.c. Tersedianya perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun kerjasama pengelolaan data spasial dengan lembaga terkait.</li> <li>• Meningkatkan kapasitas aparatur penataan ruang.</li> <li>• Meningkatkan ketersediaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan forum GIS dan jaringan data spasial</li> </ul>
--	--	--	---

	ruang yang tepat dan akurat.	perlengkapan kerja	
2 Meningkatnya perwujudan kebijakan satu peta	2.a. Meningkatnya pengendalian perijinan pemanfaatan ruang.	• Meningkatkan koordinasi pokja penataan ruang	• Pembentukan pokja penataan ruang

#### VIII. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kedelapan

1. Meningkatkan pelayanan dibidang pertamanan	1.a. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau yang nyaman dan asri. 1.b. Tersedianya Taman yang Asri dan estetis menunjang kreativitas public.	• Meningkatkan kapasitas SDM aparatur pertamanan, pemakaman dan ketenagalistrikan.	• Pelatihan tenaga pertamanan, pemakaman dan ketenagalistrikan.
2. Menyediakan tempat pemakaman yang melibatkan peran serta masyarakat. dan terdapat Ruang Terbuka Hijau	2.a. Tersedianya tempat pemakaman yang teratur, bersih dan ditunjang dengan Ruang Terbuka Hijau. 2.b. Terwujudnya tempat pemakaman yang melibatkan peran serta masyarakat.	• Meningkatkan ketersediaan perlengkapan kerja.	• Memberikan jaminan BPJS kesehatan dan ketenaga kerjaan tenaga kontrak.

3. Meningkatkan pelayanan dibidang ketenalistrikan	3.a. Tersedianya Pemeliharaan Jaringan listrik Jalan Umum. 3.b. Terwujudnya Pembangunan Jaringan listrik skala kecil.	• Meningkatkan pembangunan jaringan listrik skala kecil	• Memberikan pembangunan jaringan listrik skala kecil
--	--	---	---

#### IX. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kesembilan

1. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau yang nyaman dan asri.	1.a. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau yang nyaman dan asri.	• Perlibatan masyarakat dan swasta dalam pembangunan ruang terbuka publik.	• Penggunaan jenis – jenis tanaman lokal untuk pembangunan taman.
2. Menyediakan Taman yang Asri dan estetis menunjang kreativitas public	2.a. Tersedianya Taman yang Asri dan estetis menunjang kreativitas public	• Memaksimalkan pemanfaatan lahan terbuka	• Memberdayakan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan pembangunan ruang terbuka hijau.
3. Menyediakan Peraturan dan tata tertib dibidang pertamanan	3.a. Tersedianya Peraturan dan tata tertib dibidang pertamanan.		
4. Menyediakan taman-taman yang nyaman dan Asri.	4.a. Tersedianya taman-taman yang nyaman dan Asri		

#### X. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Misni Kesepuluh

1. Meningkatkan Kualitas Administrasi	1.a. Tersedianya Sistem administrasi Pertanahan yang	• Menyusun sistem administrasi Pertanahan yang	• Pembentukan Pokja Pembebasan
---------------------------------------	--	--	--------------------------------

Pertanahan.	akuntabel sesuai dengan hukum yang berlaku.	akuntabel sesuai dengan hukum yang berlaku.	Lahan.
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kewenangan pertanahan.	2.a. Terakomodirnya aspirasi kebutuhan pembangunan untuk kepentingan umum.	• Menyediakan Lokasi fasilitas pembangunan untuk kepentingan umum.	• Pemetaan Lokasi Kebutuhan lahan.
3. Meningkatkan kerjasama dengan semua stakeholder	3.a. Terciptanya SDM pertanahan yang handal dalam bidang teknis dan hukum pertanahan.	• Mengikutkan Diklat peningkatan SDM pertanahan yang handal dalam bidang teknis dan hukum pertanahan.	• Menghasilkan SDM yang handal dan berkualitas dibidang pertanahan
4. Mengoptimalkan pelaksanaan bidang-bidang pertanahan yang mengacu pada suksesnya GERDEMA	4.a. Terciptanya suatu peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat.	• Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dibidang pertanahan.	• Adanya komitmen pemerintah daerah dalam membangun.

## 2.2. RENCANA KINERJA

Perencanaan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

### **2.2.1. RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Perencanaan Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. Adapun komponen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau meliputi :

#### **Sasaran**

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra yang akan diwujudkan pada tahun 2018 beserta indikator dan rencana tingkat capaian (targetnya).

#### **Program**

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi lembaga yang bersangkutan. Adapun program Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk tahun 2018 sebanyak 18 program, yang terdiri dari:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
6. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
7. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
8. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
9. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
10. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

12. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
13. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman Umum
14. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
15. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
16. Program Pembangunan Sanitasi Permukiman
17. Program Perencanaan Tata Ruang
18. Program Pemanfaatan Ruang

### **Kegiatan**

Adapun Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2018 sebanyak 114 kegiatan, meliputi :

<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	
1	Penyediaan jasa administrasi keuangan
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor
3	Penyediaan alat tulis kantor
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5	Penyediaan bahan logistik kantor
6	Penyediaan makanan dan minuman

7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
8	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
9	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan ( UPTD PU )
10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ( UPTD PU )
11	Penyediaan Bahan Bakar Minyak ( UPTD PU )
12	Penyediaan Makan dan Minum ( UPTD PU )
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ( UPTD PU )
14	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan ( UPTD PU )
15	Penyediaan Material Kerja UPTD PU
16	Belanja BBM Alat Berat 4 Kecamatan
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
19	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas DPRD
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional ( UPTD PU )
21	Penyewaan Kendaraan
	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>
22	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan ( UPTD PU )
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
23	Peningkatan SDM Pengelolah Keuangan/UPTD DPUPR-PERKIM
	<b>Program pembangunan jalan dan jembatan</b>
24	Penyusunan Dokumen UKL - UPL Jalan dan Jembatan Singai Terang menuju Jembatan Gantung Pulau Sapi
25	Pembangunan Jalan Semamu - Long Sulit - Long Berang - Bang Biau - Long Pala
26	Pembangunan Jalan Long Alango - Long Kemuat - Long Berini - Apau Ping
27	Pembangunan Jalan Long Pujungan - Long Ketaman - Long Jelet

28	Pembangunan Jalan dan Jembatan Jempolon - Long Simau - Long Mekatif - Long Berang
29	Pembangunan Jalan Lokasi Pengembangan Desa Tanjung Nanga
30	Pembangunan Jalan Long Top - Long Sule
31	Pembangunan Jalan Akses ke Bandara Long Ampung
32	Peningkatan Jalan Depan Stadion/Pulau Betung
33	Peningkatan Jalan BDMS Menuju Pasar Induk
34	Peningkatan Jalan Simpang Tiga Kuala Lapang-Simpang Graha Pemuda
35	Peningkatan Jalan Simpang Poros Provinsi - Batalyon - Desa Belayan
36	Peningkatan Jalan Simpang Balai Adat Tidung - Islamic Center - Poros Provinsi
37	Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman Relokasi Eks Gang Doremi
38	Peningkatan Jalan menuju Bandara Long Ampung Kecamatan Kayan Selatan (DAK PENUGASAN)
39	Penunjang Peningkatan Jalan Menuju Bandara Long Ampung Kecamatan Kayan Selatan

40	Pembangunan Jalan Dermaga Speed-Kanal Samping Stadion Tahap III
41	Pembangunan/Fender Perkuatan Jembatan Pipa Baja Long Ampung
	<b>Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>
42	Pembangunan Saluran Drainase Area Pro Sehat
	<b>Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>
43	Pengadaan dan Pemasangan Patok Beton Tanah Aset Pemda Malinau
44	Persertifikatan Tanah Aset Pemda Malinau
	<b>Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan</b>
45	Pembangunan Jaringan Listrik dari Ibu Kota Kabupaten Malinau Menuju Desa Setarap, Punan Setarap, dan Batu Kajang, Kecamatan Malinau Selatan Hilir
46	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kab. Malinau
	<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</b>
47	Operasional Pemeliharaan Jalan Kabupaten Malinau
48	Pemeliharaan Jalan di Apau Kayan

	<b>Pengadaan tanah untuk kepentingan umum</b>
49	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan</b>
50	Pengadaan Alat Berat dan Peralatan Laboratorium serta Peralatan Workshop UPTD
	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya</b>
51	Normalisasi Sungai Kaliamok Malinau Utara
52	Pembangunan Konstruksi Penahan Longsor Sungai Sesayap Lokasi Seluwing ( Sta. 0+000 hingga 0+800 )
53	Operasional Kegiatan Normalisasi Kanal Kabupaten Malinau
54	Penyusunan Dokumen UKL - UPL Embung P.Sapi lokasi pertanian rakyat sejahtera (PPRS)
55	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Long Ampung
56	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Metulang
57	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Nawang Baru
58	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Long Nawang

59	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Long Pala
60	Normalisasi Drainase Pusat Pemerintahan
61	Perencanaan Jaringan Irigasi Desa Lidung Keminci
62	Perencanaan Jaringan Irigasi Desa Pulau Sapi
63	Pembangunan Jaringan Irigasi Long Ampung (DAK PENUGASAN)
64	Pembangunan Jaringan Irigasi Metulang (DAK PENUGASAN)
65	Pembangunan Jaringan Irigasi Sentaban (DAK PENUGASAN)
66	Peningkatan Jaringan Irigasi Long Bila (DAK PENUGASAN)
67	Pembangunan Jaringan Irigasi Nawang Baru (DAK PENUGASAN)
68	Pembangunan Jaringan Irigasi Long Nawang (DAK PENUGASAN)
69	Pembangunan Jaringan Irigasi Long Tebulo (DAK PENUGASAN)
70	Pembangunan Jaringan Irigasi Long Pala (DAK PENUGASAN)

71	Penunjang Pembangunan Jaringan Irigasi Long Ampung
72	Penunjang Pembangunan Jaringan Irigasi Metulang
73	Penunjang Pembangunan Jaringan Irigasi Sentaban
74	Penunjang Pembangunan Jaringan Irigasi Long Bila
75	Penunjang Pembangunan Jaringan Irigasi Nawang Baru
76	Penunjang Pembangunan Jaringan Irigasi Long Nawang
77	Penunjang Pembangunan Jaringan Irigasi Long Tebulo
78	Penunjang Pembangunan Jaringan Irigasi Long Pala
79	Pembangunan Turap Pengaman Arus Air di Desa Loreh
	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman Umum</b>
80	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pertamanan dan Pemakaman Umum
	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>

81	Perluasan SPAM IKK Kecamatan Kayan Hulu (DAK REGULER)
82	Peningkatan Jaringan Air Minum Kab. Malinau (DAK PENUGASAN)
83	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS III)
84	Penunjang Peningkatan Jaringan Air Minum Kabupaten Malinau
85	Penunjang Perluasan SPAM IKK Kecamatan kayan Hulu
86	Penunjang Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat (KOTAKU)
87	Penunjang Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
88	Pembangunan Jaringan Air Bersih Long Nawang
	<b>Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>
89	Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Pulau Sapi (Stadion Mini) Tahap I
90	Pembangunan Infrastruktur Terpadu Desa Long Alango - Tebulo - Lalud Birai
91	Pembangunan Infrastruktur Terpadu Desa Data Dian

92	Pembangunan Infrastruktur Terpadu Desa Long Nawang - Nawang Baru - Temuyat
93	Pembangunan Infrastruktur Terpadu Desa Long Ampung - Metulang - Sungai Barang
94	Pembangunan Infrastruktur Terpadu Desa Mahak Baru - Dumu Mahak - Lebusan
95	Perencanaan Kantor Badan Pengelolah Keuangan Daerah (BPKD) Malinau
96	Penataan Area Pro Sehat Pelangi Intimung
97	Pembangunan Panggung Kesenian dan Landscape Halaman Balai Adat Desa Wisata Pulau Sapi
98	Rehab Rumah Jabatan Bupati
99	Pembuatan Arena Pesta Budaya (IRAU)
100	Rehab Trotoar Area Pro Sehat
101	Penataan Lapangan Upacara Kantor Bupati
	<b>Program Pembangunan Sanitasi Pemukiman</b>
102	Pembangunan IPAL Komunal Kabupaten Malinau (DAK PENUGASAN)

103	Pembangunan IPAL Komunal Kabupaten Malinau (DAK REGULER)
104	Penunjang Pembagunan IPAL Komunal Kabupaten Malinau
	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>
105	Survei dan Pemetaan Jaringan Jalan Kabupaten Malinau
106	Pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) Bagi Aparatur Teknis Bidang Penataan Ruang
107	Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Malinau
108	Pengadaan Perlengkapan Survey dan Pemetaan
109	Peninjauan Kembali RTRW Kab. Malinau
110	Pemetaan Jaringan Jalan dan Permukiman Kab. Malinau
111	Perencanaan Ruang Terbuka Publik Tanjung Lapang
	<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>
112	Pelaksanaan Fungsi BKPRD dan Pokja Penataan Ruang
113	Pelaksanaan Dalam Rangka Rehabilitasi DAS

114	Pengusulan Perubahan Status Kawasan Hutan Kabupaten Malinau

### 2.2.2. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan dikategorikan ke dalam kelompok :

- a. **Masukan (Inputs)** adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. **Keluaran (Outputs)** adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan/ atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. **Hasil (Outcome) adalah** segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat; Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau. Penetapan indikator kinerja kegiatan di atas didasarkan pada perkiraan yang realistik dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang terorganisir.

Indikator kinerja dimaksud dibuat dengan memperhatikan kaidah-kaidah:

- (1) spesifik dan jelas,
- (2) dapat diukur secara obyektif,

- (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Dinas Pekerjaan Umum dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Sistem yang dimaksud adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

#### **3.1. PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (input) dan keluaran (output), sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses

yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

### **3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat lima tahapan penetapan, yaitu:

1. Penyiapan dokumen Rencana Strategik,
2. Penyiapan dokumen Rencana Kinerja Tahunan,
3. Penetapan Kinerja (PK) atas rencana kinerja tahunan yang sudah dibakukan,
4. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), yaitu penilaian tingkat pencapaian target masing-masing sasaran,
5. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), yaitu penilaian terhadap tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan.

### **3.1.2. Pengumpulan Data Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu: (1) data internal yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukimandan (2) data eksternal, berasal dari luar Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman baik data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu pada tahun-tahun ke depan, perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

➤ **EVALUASI KINERJA**

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir PKK, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategik pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

➤ **ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA**

Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini dijelaskan pula perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat dan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

- **Kinerja Kegiatan**

Rincian Pengukuran Kinerja Kegiatan tiap program masing-masing sasaran tersebut diatas dapat dicapai dengan pelaksanaan 114 (seratus empat Puluh sembilan) kegiatan strategik yang terangkum dalam 18 (dua belas) Program.

Keberhasilan masing-masing kegiatan strategik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2018 dan keterkaitannya dengan keberhasilan Program serta pencapaian Sasaran dapat dilihat pada Tabel Ikhtisar berikut ini :

**Tabel 3.1 Ikhtisar Pencapaian Keberhasilan Program dan Kegiatan**

Sasaran	Program	Kegiatan	Pelaksanaan		Ket.
			Berhasil (v)	Tidak Berhasil (v)	
Sasaran 1	Program 1				
		Kegiatan 1	v		
		Kegiatan 2	v		
		Kegiatan 3	v		
		Kegiatan 4	v		
		Kegiatan 5	v		
		Kegiatan 6	v		
		Kegiatan 7	v		
		Kegiatan 8	v		
		Kegiatan 9	v		
		Kegiatan 10	v		
		Kegiatan 11	v		
		Kegiatan 12	v		
		Kegiatan 13	v		
		Kegiatan 14	v		
		Kegiatan 15	v		
		Kegiatan 16	v		
	Program 2				
		Kegiatan 17	v		
		Kegiatan 18	v		
		Kegiatan 19	v		
		Kegiatan 20	v		
		Kegiatan 21	v		

	Program 3				
		Kegiatan 22	✓		
	Program 4				
		Kegiatan 23	✓		
	Program 5				
		Kegiatan 24	✓		
		Kegiatan 25	✓		
		Kegiatan 26	✓		
		Kegiatan 27	✓		
		Kegiatan 28	✓		
		Kegiatan 29	✓		
		Kegiatan 30	✓		
		Kegiatan 31	✓		
		Kegiatan 32	✓		
		Kegiatan 33	✓		
		Kegiatan 34	✓		
		Kegiatan 35	✓		
		Kegiatan 36	✓		
		Kegiatan 37	✓		
		Kegiatan 38	✓		
		Kegiatan 39	✓		
		Kegiatan 40	✓		
		Kegiatan 41	✓		
	Program 6				
		Kegiatan 42	✓		
	Program 7				
		Kegiatan 43	✓		
		Kegiatan 44		✓	Proses Administrasi Yang Memakan Waktu Lama dan Kendala Dari Pihak Yang Bersangkutan
	Program 8				
		Kegiatan 45	✓		

		Kegiatan 46	✓		
	Program 9				
		Kegiatan 47	✓		
		Kegiatan 48	✓		
	Program 10				
		Kegiatan 49	✓		
	Program 11				
		Kegiatan 50	✓		
	Program 12				
		Kegiatan 51	✓		
		Kegiatan 52	✓		
		Kegiatan 53	✓		
		Kegiatan 54	✓		
		Kegiatan 55	✓		
		Kegiatan 56	✓		
		Kegiatan 57	✓		
		Kegiatan 58	✓		
		Kegiatan 59	✓		
		Kegiatan 60	✓		
		Kegiatan 61	✓		
		Kegiatan 62	✓		
		Kegiatan 63	✓		
		Kegiatan 64	✓		
		Kegiatan 65	✓		
		Kegiatan 66	✓		
		Kegiatan 67	✓		
		Kegiatan 68	✓		
		Kegiatan 69	✓		
		Kegiatan 70	✓		
		Kegiatan 71	✓		

		Kegiatan 72	✓		
		Kegiatan 73	✓		
		Kegiatan 74	✓		
		Kegiatan 75	✓		
		Kegiatan 76	✓		
		Kegiatan 77	✓		
		Kegiatan 78	✓		
		Kegiatan 79	✓		
	Program 13				
		Kegiatan 80	✓		
	Program 14				
		Kegiatan 81	✓		
		Kegiatan 82	✓		
		Kegiatan 83	✓		
		Kegiatan 84	✓		
		Kegiatan 85	✓		
		Kegiatan 86	✓		
		Kegiatan 87	✓		
		Kegiatan 88	✓		
	Program 15				
		Kegiatan 89	✓		
		Kegiatan 90	✓		
		Kegiatan 91	✓		
		Kegiatan 92	✓		
		Kegiatan 93	✓		
		Kegiatan 94	✓		
		Kegiatan 95	✓		
		Kegiatan 96	✓		
		Kegiatan 97	✓		
		Kegiatan 98	✓		
		Kegiatan 99	✓		

		Kegiatan 100	✓		
		Kegiatan 101	✓		
	Program 16				
		Kegiatan 102	✓		
		Kegiatan 103	✓		
		Kegiatan 104	✓		
	Program 17				
		Kegiatan 105	✓		
		Kegiatan 106	✓		
		Kegiatan 107	✓		
		Kegiatan 108	✓		
		Kegiatan 109	✓		
		Kegiatan 110	✓		
		Kegiatan 111	✓		
	Program 18				
		Kegiatan 112	✓		
		Kegiatan 113	✓		
		Kegiatan 114	✓		

- Pencapaian Atas Penetapan Kinerja**

Realisasi Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau pada dasarnya sama dengan Pencapaian Kinerja Kegiatan mengingat data yang digunakan keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu APBD.

- Aspek Anggaran**

Anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2018 adalah Rp. 168.421.310.464,75

Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau tergolong baik karena mampu menyerap anggaran Rp 165.070.504.041,00

dari alokasi anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 168.421.310.464,75 dengan progres 99,48 %. Hal-hal yang dapat dijadikan catatan penting untuk dapat dilakukan pada Tahun 2019 adalah meningkatkan pencapaian kinerja/outcome, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Optimalisasi koordinasi baik internal maupun eksternal di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman sehingga kegiatan dapat terselenggara sesuai target.
2. Penajaman TOR/KAK kegiatan yang akan dilakukan di awal tahun sehingga penyelenggaraan dapat berjalan sesuai rencana.
3. Akurasi dalam penginputan nomenklatur kegiatan dalam DPA harus sesuai dengan usulan kegiatan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Malinau merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2018. LKjIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80).

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Malinau Kabupaten Malinau telah dapat mencapai 18 (dua belas) Sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik.

#### 4.2 Langkah Perbaikan

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Malinau akan mengupayakan langkah perbaikan kedepan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas dan Kinerja SDM Aparatur Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Malinau;
2. Peningkatan Manajemen Koordinasi Penyusunan Rencana Program Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Malinau;
3. Peningkatan Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Malinau.

Dengan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau ini, diharapkan dapat memacu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, untuk lebih transparan, akuntabel, dan partisi patif menuju Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malinau yang aman, Nyaman, dan Damai, melalui Program Pemerintah Gerakan Desa Membangun (GERDEMA).